

Penggunaan Danais Wajib Ada Rekam Jejak yang Jelas

YOGYA (KR)-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong selesainya berbagai program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, pemaksimalan pembangunan infrastruktur, pelestarian kebudayaan, pendidikan dan lainnya. Untuk itu wajib ada efisiensi anggaran dan kerjasama antar OPD agar semua program berjalan maksimal.

Selain itu OPD-OPD wajib saling terintegrasi untuk menangani program yang ada, dengan satu leading sector. Tidak boleh ada program yang sama persis antara satu OPD dengan OPD yang lain, agar penanganan bisa maksimal. Wajib ada fokus masing-masing OPD sehingga permasalahan bisa tertangani dengan baik.

"Apabila hal itu bisa dilakukan dengan baik maka kita akan lebih fokus untuk menangani suatu

permasalahan. APBN pun bisa terpetakan dengan jelas, jadi lebih efektif. Sistem manajemen dan pertanggungjawaban harus disiapkan dengan baik. Itu tugasnya dinas atau lembaga terkait," kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X usai membuka ruang dialog bersama para kepala OPD di DIY untuk meningkatkan akuntabilitas pada setiap penanganan program di Gedhong Pracimanasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (27/4). Sultan mengatakan, ba-

nyaknya program yang di biyai oleh Dana Keistimewaan (Danais) menjadi-wanti banyak hal. Karena Danais wajib ada rekam jejak penggunaan anggaran dengan pertanggungjawaban yang jelas. Jadi Danais yang dipakai untuk mendukung kebudayaan harus memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu pihaknya sedang mengkaji, apakah pendekatan kebudayaan mampu mendukung kegiatan pertumbuhan perekonomian dan daya untuk hidup lebih

baik bagi masyarakat. Apabila tidak, maka perlu metode baru dan pola baru dalam pengelolaannya.

"Saya tidak ingin OPD hanya sekedar melakukan pemanfaatan anggaran saja, namun dengan hasil yang bisa dikatakan tidak maksimal. Jangan asal anggaran habis. Karena menghabiskan anggaran itu mudah, tapi memaksimalkan anggaran dengan tepat itu yang tidak mudah. Yang penting bagi saya adalah hasil dari pembiayaan itu. Produk yang dihasilkan bisa berkembang," tegas Sultan.

Sedangkan Wagub DIY Sri Paku Alam X yang turut mendampingi Sri Sultan HB X mengatakan, wajib ada peningkatan kolaborasi dan kerjasama

lintas OPD. Apabila program dilakukan sendiri-sendiri, berapapun biayanya, output dan impactnya tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Beberapa kali evaluasi atas pelaksanaan program menunjukan,

kerjasama dan kolaborasi memang berhasil memaksimalkan Pemda DIY mengatasi suatu permasalahan.

"Kolaborasi ini tolong dijadikan penilaian kerjasama lintas sektoral. Terutama sekarang ini

ada tiga hal yang harus kita kejar, kemiskinan, stunting dan edukasi. Mangga, silakan nanti saling meningkatkan kolaborasi antara OPD agar program kita bisa berhasil secara maksimal," ungkap Wagub DIY. **(Ria)-f**

Persiapan Terima Napi Terorisme Lapas II A Yogyakarta Disidak

YOGYA (KR) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Rabu (26/4). Kunjungan itu bersamaan dengan layanan kunjungan tatap muka Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan persiapan penerimaan narapidana terorisme.

"Selamat berjumpa kembali dengan keluarga masing-masing bapak/ibu, setelah acara seperti ini sempat ditiadakan karena Covid-19, kini bisa berjumpa kembali. Kami mohon kerjasamanya agar tertib mengikuti aturan yang ada," pesannya.

Gusti Ayu juga melakukan peninjauan sarana prasarana serta kinerja para pegawai Lapas Yogyakarta. "Tinjauan dilakukan untuk memastikan tusi dilakukan sesuai dengan SOP maupun peraturan yang ada," tegasnya.

Sementara menindaklanjuti rencana pengiriman 3 (tiga) orang narapidana terorisme ke Lapas Yogyakarta, Gusti Ayu melakukan pengecekan persiapan, baik proses penerimaan maupun rencana penempatan narapidana terorisme. "Pelaksanaan kegiatan pemindahan secara teknis nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pengawasan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," jelasnya. **(Vin)-f**

REST IN PEACE
Telah berpulang ke Surga dengan damai.
Pada hari Kamis, 27 April 2023 pk. 12.20 WIB
Suami, Papa, Papa Mertua, Engkong, Saudara kami terkasih:

WIDARTO / OEI KEE LING

Usia 78 Tahun
Bengkel Las & Konstruksi Baja NGABEAN
Perum Griya Alvita Ruko no. 11-12
Jl. Wates Km 3 Yogyakarta

Jenazah disemayamkan di rumah duka PUKJ Ruang C,
Jl. Sonopakis Lor Yogyakarta. Akan dikuburkan di pemakaman
Gunung Sempu Bantul hari Senin, 1 Mei 2023. Berangkat pk. 09.00 WIB
Satu jam sebelumnya diadakan Kebaktian Pelepasan Jenazah.

Kami yang mengasihi:
Istri: Ong Mie Swie / Ari Susilowati
Anak & Menantu:
Agung Santoso ~ Rika
Anton Widarto ~ Ratna Vira Hartanto
Wenny Sri Wahyuni ~ Yakub Darmawan
Anita Welliana ~ Andreas Chandra Setiawan
Cucu:
Daniel Pratama Putra Santoso, Danela Raquel Putri Santoso,
Alvino Suro Saputro, Phillia Putri Antonia Ketleen,
Olivia Putria Antonia, Timothy Sebastian Darmawan,
Tiffany Seraphine Darmawan, Nathanael Robert Setiawan
Beserta segenap keluarga dan family

TURUT BERDUKA CITA ~ R.U.K.W (0274) 377071, 385622

Pemerintah Kota Yogyakarta

YK jogja
KOTA YOGYAKARTA

istimewa

java

seribu warna indonesia

FESTIVAL KAMPUNG WISATA 2023

MINGGU 30 APRIL, ALUN-ALUN KIDUL
PUKUL 10⁰⁰ - 22⁰⁰ WIB

PENTAS SENI, PENTAS TARI, PENTAS MUSIK, DAN PAMERAN POTENSI KAMPUNG WISATA

DIPOWINATAN | KADIPATEN KAUMAN | PATEHAN (TAMANSARI)

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

DPRD KOTA YOGYAKARTA PERTAHANKAN PROPEMPERDA 2023

Gerak Cepat Tindaklanjuti Hasil Rekomendasi



Tim Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta melakukan finalisasi.

YOGYA (KR) - Sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023 mendapat pencerminan dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY. DPRD Kota Yogyakarta berupaya gerak cepat dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut agar Propemperda 2023 dapat dipertahankan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, mengaku terda-

pat empat naskah raperda yang mendapat catatan dari Kemenkumham DIY. Seluruhnya merupakan inisiatif dari lembaga legislatif. "Total raperda yang menjadi inisiatif dewan itu ada lima produk. Empat produk di antaranya ada catatan dari Kemenkumham, sehingga ini yang sedang kami kejar betul penyempurnaannya," terangnya. Satu-satunya raperda inisiatif dewan yang siap untuk dilanjutkan pembahasannya ialah dari Komisi C terkait perubahan perda penanggulangan bencana. Sedangkan empat raperda yang

butuh tindaklanjut masing-masing dari Komisi A terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Komisi B terkait perlindungan UKM dan koperasi, Komisi D terkait penyelenggaraan kesejahteraan warga lanjut usia, dan dari Bapemperda terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Catatan tersebut berkaitan dengan draf maupun naskah akademik yang sebelumnya disusun oleh pihak ketiga.

Atas catatan itu, Bapemperda langsung melakukan pembahasan internal dilanjutkan koordinasi dengan masing-masing pimpinan komisi maupun pimpinan dewan. Bahkan tanpa perlu menunggu waktu lama, tiap komisi yang berkaitan juga melakukan pembahasan bersama Kemenkumham maupun Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta. "Hasilnya akan kami eksplor bersama pada awal Mei besok, tepatnya Selasa (2/5)," tandas Tri Waluko Widodo.

Dari informasi awal, naskah dari Komisi A sudah dilakukan penyempurnaan bersama Kemenkumham dan dapat dilanjutkan pembahasan. Begitu pula naskah dari Komisi B dan Komisi D yang akan dikoordinasikan pekan depan. Harapannya semua sudah berhasil dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian sehingga tata kala pembahasan dapat digulirkan. Dengan demikian, Propemperda 2023 bisa bergulir sesuai target awal.

Hanya, imbu Tri Waluko Widodo, naskah dari Propemperda masih terjadi dinamika. Hal ini lantaran tidak hanya pada draf melainkan juga naskah akademik yang perlu dirombak. Pihak ketiga yang melakukan penyusunan se-

belumnya juga mengaku kesulitan jika harus merombak dari awal. Diakuinya, raperda terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TSLP sudah terjadi dinamika sejak periode sebelumnya. Pasalnya waktu itu pernah diajukan namun di tingkat provinsi tertolak atau tidak lolos. Kondisi serupa juga terjadi pada saat ini. "Kemarin kami sudah bertemu Bagian Hukum dan Bappeda Kota Yogya. Mereka khawatir kalau raperda TSLP nanti diundangkan justru malah membatasi ruang gerak eksekutif, karena selama ini sudah dijalankan. Justru pandangan kami tidak seperti itu. Jika ada payung hukum, bisa lebih terarah," urainya.

Menurut pandangan dewan, payung hukum berupa perda terkait pelaksanaan TSLP bisa memberikan reward dan punishment bagi perusahaan menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga tidak hanya perusahaan itu-itu saja yang memperhatikan lingkungan melainkan perusahaan lain yang menjalankan aktivitasnya di Kota Yogyakarta. Kendati demikian, hal tersebut harus tetap memperhatikan berbagai aspek agar tidak menghambat investasi.

Meski begitu, ketika nanti akhirnya raperda terkait TSLP terpaksa tidak bisa dilanjutkan pembahasannya maka Bapemperda akan menunggu kesiahan eksekutif apakah ada raperda pengganti yang dapat diusulkan atau tidak. Jika tidak ada, maka otomatis jumlah Propemperda 2023 akan berkurang dan anggarannya pun berubah serta perlu disesuaikan melalui APBD perubahan. Sebaliknya, ketika ada raperda pengganti maka tidak perlu sampai merubah kom-



Jajaran Komisi D melakukan pembahasan dan penyempurnaan dengan Kemenkumham.

posisi Propemperda 2023. Diberitakan sebelumnya, Propemperda 2023 yang sudah ditetapkan berisi 14 produk hukum. Tiga produk hukum di antaranya bersifat wajib karena berkaitan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni menyangkut APBD 2024, APBD Perubahan 2023 dan Pertanggung jawaban APBD 2022.

Kemudian lima produk hukum inisiatif dewan, dan sisanya dari eksekutif yakni terkait pengarusutamaan gender, pencabutan perda terkait sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan,

penambahan penyertaan modal PDAM dan Jogjatama Vishesha, pajak dan retribusi daerah, serta sistem penyelenggaraan pendidikan.

Tri Waluko Widodo menegaskan, kendati raperda dari legislatif sempat mendapatkan catatan dari Kemenkumham namun alokasi waktu untuk melakukan pembahasan hingga memperoleh nomor registrasi, masih sangat mencukupi. Hal ini karena semua raperda dari dewan tersebut dialokasikan pembahasannya pada semester dua tahun ini. **(Dhi)-f**



Tim eksekutif menjabarkan rancangan produk hukum di DPRD Kota Yogyakarta.



Pansus membahas raperda DPRD Kota Yogyakarta melakukan pembahasan.